

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DESA PADA KEPENGHULUAN
PUJUD KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**



OLEH :

ADRI TRIANSYAH

175310645

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

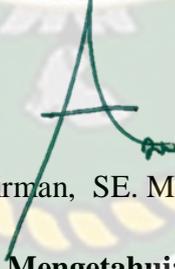
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adri Triansyah
NPM : 175310645
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada
Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten
Rokan Hilir

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING


Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA

Mengetahui:

DEKAN



Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA

KETUA PRODI



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 133 Perhentian Marpoyan

Tel. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – 28284

NOTULEN SEMINAR PROPOSAL

1. NAMA MAHASISWA : **ADRI TRIANSYAH**
2. NPM : 175310645
3. HARI/TANGGAL : Rabu, 21 April 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Desa
Pada
Kepenghuluan Pujud Kecamatan
Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Sidang dibuka oleh **Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA.** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama lima belas menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

NO	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak. CA <ul style="list-style-type: none">• Memastikan Judul Berada di Kecamatan dan Kabupaten mana• Memperbaiki latar belakang masalah• Memperjelas masalah• Memperbaiki sistematika penulisan• Memperbaiki susunan lampiran data	<ul style="list-style-type: none">• Sudah diperbaiki• Sudah diperbaiki• Sudah diperbaiki• Sudah diperbaiki• Sudah diperbaiki	Terlihat pada halaman cover dan abstrak Terlihat pada halaman 3 Terlihat pada halaman 4 dan 5	

2	<p>Yolanda Pratami, S.E., M.Ak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki penulisan judul • Menambahkan referensi dan memperbaiki pada paragraf 1 dan 2. • Menambahkan lampiran pada yang terkait aset. • Memperjelas masalah. • Menggunakan referensi 10 tahun terakhir. • Menambahkan kesimpulan sendiri setelah menurut para ahli. • Memperbaiki penulisan lokasi penelitian. • Memastikan semua referensi masuk dalam daftar pustaka • Memperbaiki penulisan miring pada bahasa asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diperbaiki 	<p>Terlihat pada halaman cover</p> <p>Terlihat pada halaman 1 dan 2</p> <p>Terlihat pada halaman 4</p> <p>Terlihat pada halaman 4 dan 5</p> <p>Terlihat pada halaman 22</p> <p>Terlihat pada halaman 71</p>	
----------	--	--	---	--



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 133 Perhentian Marpoyan

Tel. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru - 28284

NOTULEN SEMINAR HASIL

5. NAMA MAHASISWA : **ADRI TRIANSYAH**
6. NPM : 175310645
7. HARI/TANGGAL : Jum'at, 16 Juli 2021
8. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Desa
Pada
Kepenghuluan Pujud Kecamatan
Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Sidang dibuka oleh **Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA.** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama lima belas menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

NO	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak. CA. <ul style="list-style-type: none">• Memperbaiki Kalimat Pada Abstrak• Menambahkan Profil Desa Sebelum Masuk Masalah• Memperbaiki Kalimat Pada Tujuan Penelitian• Memperbaiki Kalimat Pada Teknik Pengumpulan Data• Menambahkan Teori Kenapa Harus Dilakukan Penyusutan• Menambah Kalimat Pada Saran	<ul style="list-style-type: none">• Sudah diperbaiki• Sudah diperbaiki• Sudah diperbaiki• Sudah diperbaiki• Sudah diperbaiki• Sudah diperbaiki	<p>Terlihat pada abstrak</p> <p>Terlihat pada halaman 1</p> <p>Terlihat pada halaman 5</p> <p>Terlihat pada halaman 22 dan 23</p> <p>Terlihat pada halaman 70</p>	

2	<p>Nina Nursida, SE., M.Acc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki penulisan judul • Memperbaiki susunan dan kalimat pada abstrak • Memperbaiki sistematika penulisan pada bab IV • Menjelaskan maksud dari kepenghuluan • Menjelaskan bahwa tidak menggunakan SISKUEDES • Menambah penjelasan atau analisis setelah membuat tabel data 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diperbaiki 	<p>Terlihat pada halaman cover</p> <p>Terlihat pada halaman abstrak</p> <p>Terlihat pada halaman 1</p> <p>Terlihat pada halaman 1</p> <p>Terlihat pada tabel bab IV</p>	
----------	---	--	---	--



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ADRI TRIANSYAH
NPM : 175310645
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DESA PADA
KEPENGHULUAN PUJUD KECAMATAN PUJUD
KABUPATEN ROKAN HILIR
SPONSOR : **Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA.**

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut :

Tanggal	Catatan		Berita Acara	Paraf	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co Sponsor
13/02/2021	X		<ul style="list-style-type: none">- Meringkas teori dan memfokuskan teori pada akuntansi desa.- Membuat proses akuntansi sampai membuat laporan keuangan.- Menentukan permasalahan yang ada dari proses akuntansi- Menentukan permasalahan dari segi pencatatan, pengakuan, dan		

			<ul style="list-style-type: none"> - pengukuran. - Memastikan kesesuaian laporan atau data dengan penelitian yang diangkat. 		
05/03/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Memperjelas masalah akuntansi yang ada didesa. - Membandingkan proses akuntansi yang dilakukan desa dengan IAI-KASP Tahun 2015 		
10/03/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kesesuaian teori tentang penyusutan untuk dijadikan masalah. 		
17/03/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - ACC Proposal. 		
30/06/2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan pengakuan pada pendapatan dan beban yang digunakan desa. - Membuat proses akuntansi yang dibuat desa sampai dengan laporan keuangan dan bandingkan dengan standar yang ada. - Pembahasan pada laporan keuangan dibandingkan dengan teori. 		

12/07/2021	X		- ACC Skripsi		
------------	---	--	---------------	---	--

Pekanbaru, 24 April 2021

WAKIL DEKAN I



Dr. H. Elvan Sastraningsih, SE., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 761/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 15 Juli 2021, Maka pada Hari Jum'at 16 Juli 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Adri Triansyah |
| 2. NPM | : 175310645 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. |
| 5. Tanggal ujian | : 16 Juli 2021 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 68,9 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

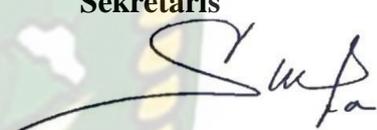
Ketua



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

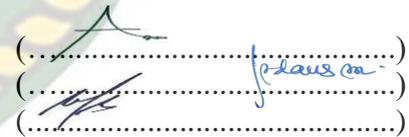


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
2. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
3. Nina Nursida, SE., M.Acc



Notulen

1. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA



Pekanbaru, 16 Juli 2021

Mengetahui Dekan,



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Adri Triansyah
NPM : 175310645
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Kepenghuluan PujudKecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
Hari/Tanggal : Jum'at 16 Juli 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Nina Nursida, SE., M.Acc		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **68,5**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 16 Juli 2021
Ketua Prodi



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Adri Triansyah
NPM : 175310645
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Kepenghuluan Pujud.
Pembimbing : 1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 21 April 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

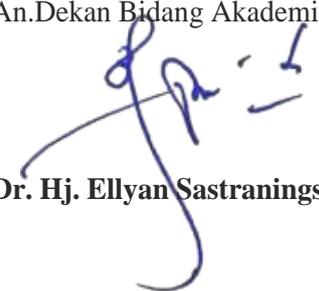
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Ketua	1. 
2.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Anggota	3. 

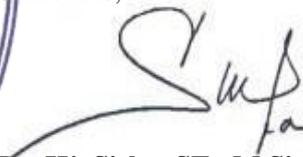
*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 21 April 2021
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 858/Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SI
Bismillahirrohmanirrohim

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1 Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5 Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor :192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor :197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor :197/SK BAN-PT/Ak-XVI/S/IX 2013, tentang Akreditasi .Akuntansi SI
 d. Nomor :001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/1/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLP1 Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

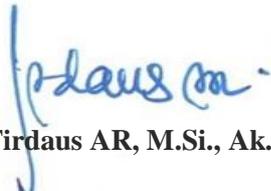
MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	Nama	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor. C/c	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 Nama : Adri Triansyah
 NPM : 175310645
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / SI
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Kcpenghulunn Pujud
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru Pada
 Tanggal: 19 Agustus 2020
 Dekan.


Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA

- Tembusan : Disampaikan pada:
 1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 761 / Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Adri Triansyah
 N P M : 175310645
 Program Studi : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensiv maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, IV/a	Sistematika	Sekretaris
3	Nina Nursida, SE.,M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Lektor Kepala, D/a	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Halimahtussakdiah, SE.,M.Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada Media Pekanbaru.

tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Juli 2021
 Dekan

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ADRI TRIANSYAH
NPM : 175310645
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DESA PADA
KEPENGHULUAN PUJUD KECAMATAN PUJUD KABUPATEN
ROKAN HILIR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 27 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juli 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DESA PADA KEPENGHULUAN PUJUD KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseuruhan atau sebagai tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberika pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Yang memberikan pernyataan,

Adri Triansyah

NPM : 175310645

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DESA PADA KEPENGHULUAN PUJUD KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR

OLEH :

ADRI TRIANSYAH

175310645

Penelitian yang dilakukan di Desa atau Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari penerapan akuntansi keuangan yang dilakukan Kepenghuluan Pujud dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data Primer yang merupakan Data langsung yang diambil dengan cara wawancara dengan bidang keuangan yang terkait penerapan akuntansi Desa pada Kepenghuluan Pujud. Kemudian data sekunder yang merupakan Data yang diperoleh dari data atau laporan keuangan yang telah disusun oleh kantor kepenghuluan pujud kecamatan pujud tahun 2018 dan 2019. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kepenghuluan pujud tidak menghitung persediaan yang tersisa diakhir periode, kepenghuluan pujud juga Tidak menghitung akumulasi penyusutan pada aset tetap, dan juga tidak menyajikan nilai aset yang diperoleh pada tahun sebelumnya kedalam tahun pelaporan. Sehingga penerapan akuntansi yang dilakukan kepenghuluan pujud belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata kunci : Penerapan Akuntansi, Prinsip Akuntansi Berterima Umum, Kepenghuluan Pujud.

ABSTRACT
ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATION IN PUJUD VILLAGE
PUJUD DISTRICT ROKAN HILIR REGENCY

By :

ADRI TRIANSYAH

175310645

This research was conducted in Pujud Village Pujud District Rokan Hilir Regency which aims to find out the suitability of the application of accounting carried out by the village of Pujud with Generally Accepted Accounting Principles.

The types and sources of data in this research is primary data which is direct data taken by way of interviews the finance department related to the application of accounting in the village of pujud. Then secondary data which is data obtained from financial statements that have been prepared by village of pujud in 2018 and 2019. The data analysis technique used is descriptive method.

From the results of the research conducted, it can be seen that the village of pujud is not counting and the inventory remaining at the end of the period, village of pujud does not calculate accumulated depreciation on fixed assets, and then not presenting assets acquired in the previous year into the reporting year. So that the application of accounting carried out by village of pujud is not fully in accordance with Generally Accepted Accounting Principles.

Keywords : Accounting Application, Generally Accepted Accounting Principles, village of pujud.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat-Nya yang selama ini kita dapatkan, yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga oleh karenanya saya dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat lulus dan mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi S1 Universitas Islam Riau. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

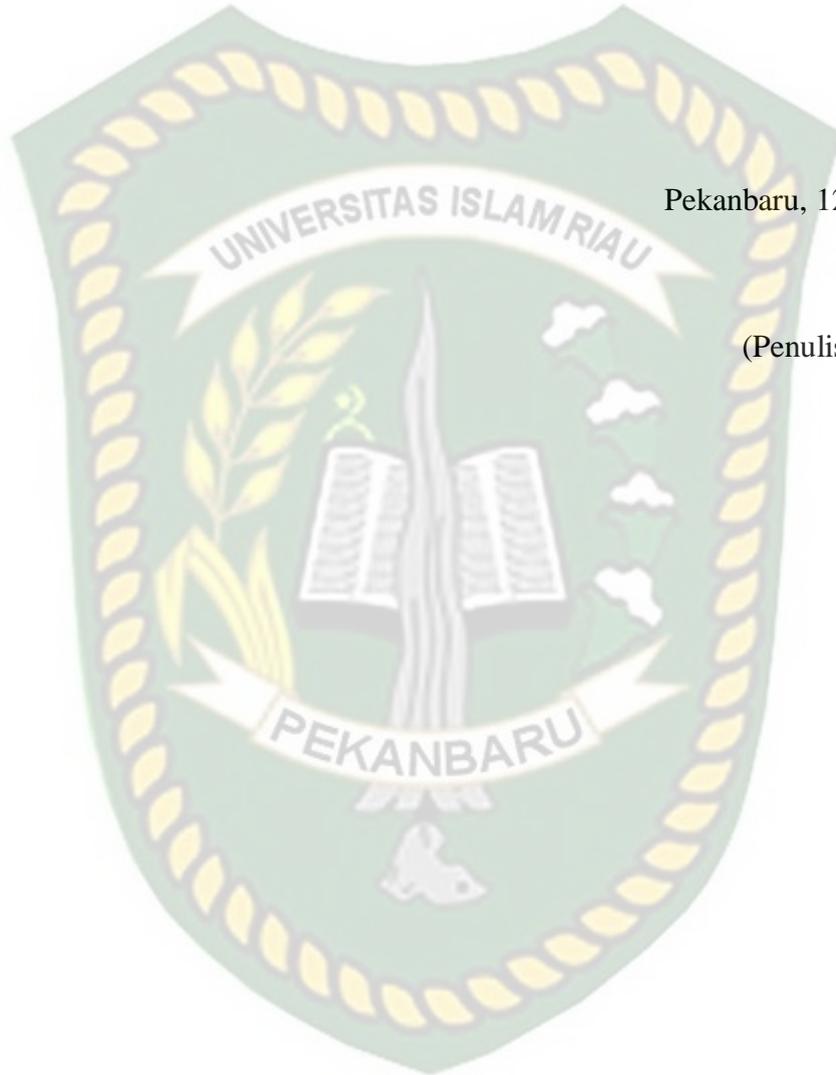
1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Firdaus AR SE., M.Si. Ak.,CA** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Dr. Siska SE. M.Si Ak, CA** Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak.** Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

5. Bapak **Dr. Azwirman, SE., M.Acc, CPA** Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan tenaga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Afrizal S.Pd.I** Selaku Penghulu Pada Kepenghuluan Pujud yang telah banyak memberikan bantuan dan menizinkan penulis melakukan penelitian pada Desa atau Kepenghuluan Pujud.
7. Bapak **Muhammad Zulfadli, S.Kom** Selaku Kaur Keuangan Kepenghuluan Pujud yang telah banyak memberikan bantuan berupa data-data kepada penulis sehingga penulis dapat mengambil data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajar penulis selama perkuliahan hingga perkuliahan penulis selesai.
9. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah membantu proses administrasi selama perkuliahan.
10. Terimakasih dan pengharaan sebesarnya kepada Ayah dan Ibu beserta keluarga yang saya cintai yang selalu mendo'akan saya dan memberikan semangat dan dorongan yang berharga selama mengikuti pendidikan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terimakasih untuk seluruh teman-teman angkatan 2017 Jurusan Akuntansi S1 Universitas Islam Riau, terkhususnya teman seperjuangan dari Orang Kaya Dokagu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan selanjutnya.

Pekanbaru, 12 July 2021

(Penulis)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

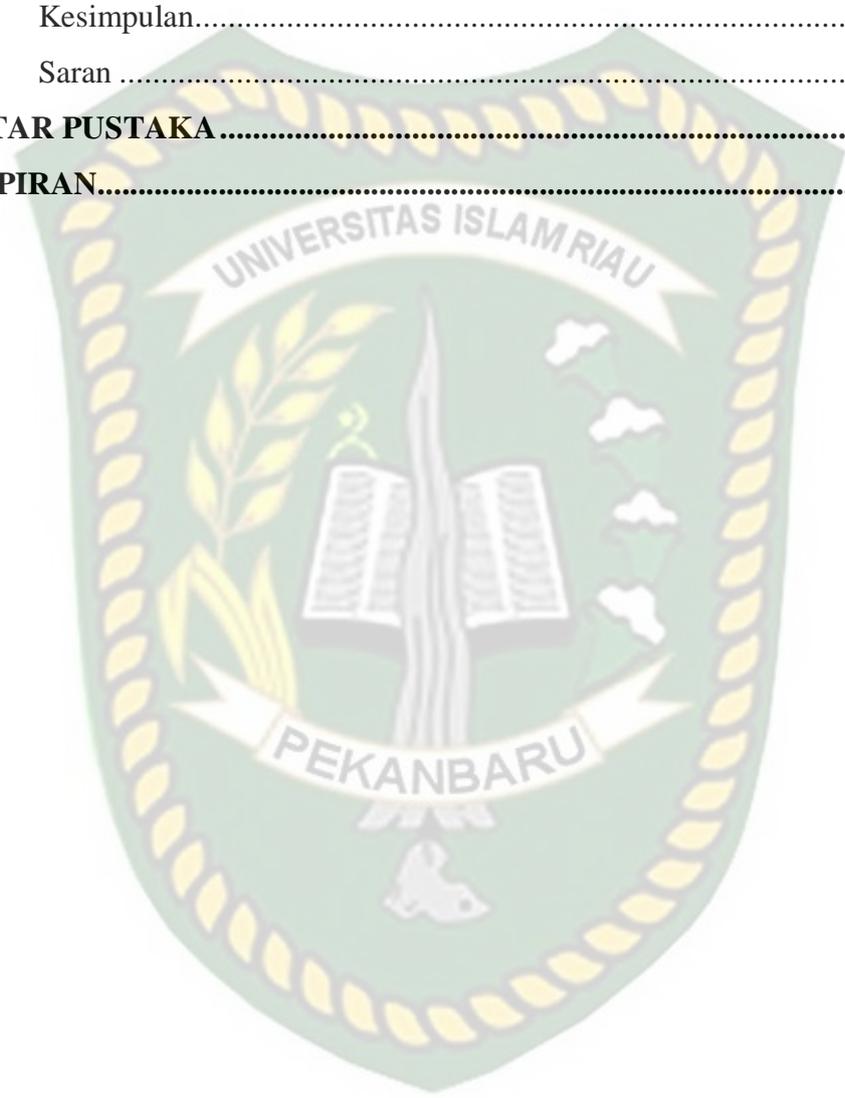
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL.....	v
NOTULENSI SEMINAR HASIL.....	vii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	x
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	xi
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	xii
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	xiii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING.....	xiii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	xv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME.....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	8
2.1 Telaah Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian Desa	8

2.1.2	Pengertian Akuntansi dan PSAK.....	9
2.1.3	Pengertian Akuntansi Desa	10
2.1.4	Pemerintahan Desa	11
2.1.5	Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.1.6	Laporan Keuangan Desa	14
2.1.7	Prinsip-Prinsip Akuntansi	14
2.1.8	Siklus Akuntansi.....	16
2.1.9	Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
2.1.10	Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa	18
2.1.11	Sistem Pencatatan Keuangan Desa.....	19
2.2	Hipotesis.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		21
3.1	Desain Penelitian	21
3.2	Objek penelitian.....	21
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	22
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5	Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		24
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	24
4.1.1	Sejarah Singkat Kepenghuluan Pujud.....	24
4.1.2	Demografi	25
4.1.3	Keadaan Sosial	26
4.1.4	Kondisi Pemerintah Kepenghuluan	29
4.1.5	Struktur Organisasi Kepenghuluan Pujud	31
4.1.6	Masalah dan Potensi Desa.....	32
4.1.7	Visi dan Misi	38
4.2	Hasil Penelitian.....	39
4.2.1	Sistem pencatatan dan dasar pengakuan	39
4.2.2.	Tahap pencatatan	40
4.2.3.	Tahap Penggolongan.....	45
4.2.4.	Tahap Pengikhtisaran.....	50

4.2.5. Data Penyesuaian	61
4.2.6. Penyajian Laporan Keuangan Kepenghuluan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 : Buku Kas Umum Kepenghuluan Pujud Tahun Anggaran 2019
- Tabel 4.2 : Buku Bank Kepenghuluan Pujud Tahun Anggaran 2015
- Tabel 4.3 : Buku Pembantu Pajak Kepenghuluan Pujud Tahun Anggaran
- Tabel 4.4 : Buku Besar Akun Kas di Bendahara
- Tabel 4.5 : Buku Besar Akun Pendapatan Transfer
- Tabel 4.6 : Buku Besar Akun Belanja Siltap dan Tunjangan
- Tabel 4.7 : Buku Besar Akun Belanja Operasional
- Tabel 4.8 : Neraca Saldo Kepenghuluan Pujud Tahun Anggaran 2019
- Tabel 4.9 : Neraca Lajur Kepenghuluan Pujud Tahun Anggaran 2019
- Tabel 4.10 : Nlilai Aktiva Tetap
- Tabel 4.11 : Nilai Persediaan
- Tabel 4.12 : Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019
- Tabel 4.13 : Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019
- Tabel 4.14 : Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan Pujud Sampai Dengan 31 Desember 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kepenghuluan Pujud



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Pujud Tahun 2018 dan Tahun 2019
- Lampiran 2: Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan Pujud Tahun 2018 dan Tahun 2019
- Lampiran 3 : Buku Kas Umum Kepenghuluan Pujud
- Lampiran 4 : Buku Bank Kepenghuluan Pujud
- Lampiran 5 : Buku Pembantu Pajak Kepenghuluan Pujud



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah informasi berguna yang didalamnya berupa proses identifikasi, pengukuran, dan pengkomunikasian bagi pemangku keputusan dan kebijakan dalam pemakainya untuk menghasilkan informasi. (Samryn 2013:4).

Dalam berjalannya ekonomi dan sistem sosial, Akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah seperti pada pemerintah desa yang memerlukan informasi akuntansi. Akuntansi (*accounting*) terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi ke para pengguna informasi akuntansi.

Didalam akuntansi juga terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang merupakan pedoman atau acuan dalam prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi. Seorang akuntan memerlukan PSAK dalam menjalankan pekerjaan, karena menyesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Salah satu institusi yang memerlukan akuntansi dalam aktivitasnya yaitu desa, karena desa memiliki dana desa yang cukup besar yang diharapkan agar desa bisa menggunakan dana desa sebaik mungkin yang dapat mensejahterakan masyarakat. Melihat besarnya anggaran yang dialokasikan ke desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa seperti dapat

meminimalisir kesenjangan sosial, mengurangi masalah kemiskinan, dan masalah sosial lainnya.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam Desa Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bendahara disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Maka dari itu desa memerlukan akuntansi dalam aktivitasnya, karena desa juga memiliki otonomi pengelolaan keuangan desa yang harus dipertanggungjawabkan.

Sistem akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desayaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Sujarweni, 2015:17).

Didalam desa juga terdapat siklus akuntansi merupakan proses atau tahapan yang dilakukan dari terjadinya transaksi sampai dibuatnya laporan keuangan. Laporan keuangan desa terdapat 4 tahapan menurut IAI-KASP 2015 (12-13) yaitu, 1. tahap pencatatan, 2. tahap penggolongan, 3. tahap pengikhtisaran, dan 4. tahap pelaporan.

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di transfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72). Pada kepenghuluan pujud untuk tahun anggaran 2018 desa atau kepenghuluan ini mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 987,719,624.00 (lampiran 1) dan untuk tahun 2019 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1,221,640,515.00 (lampiran 1) yang bisa digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan.

Kepenghuluan pujud merupakan pemerintahan desa yang berada di Kecamatan pujud Kabupaten rokan hilir. Kata kepenghuluan itu sendiri merupakan sebutan lain yang digunakan setiap desa yang berada di kecamatan pujud untuk menyebutkan desa.

Pada era sekarang banyak desa yang sudah menggunakan sistem dalam menyusun laporan keuangan yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), namun kepenghuluan pujud belum menggunakan SISKEUDES

dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan. Kepenghuluan pujud dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan Basis Kas (*Cash Basis*) dengan dasar harga perolehan. Karena kepenghuluan pujud pencatatannya baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. Dalam bahasa yang lain, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembayaran. Sistem pencatatan yang digunakan kepenghuluan pujud yaitu *single entry*.

Kepenghuluan pujud memulai proses akuntansinya dari transaksi yang terjadi dengan adanya bukti transaksi kemudian mencatat transaksi tersebut pada buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Selanjutnya bendahara desa membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan, yang dibuat oleh bendahara dan laporannya dibuat dari data pendapatan, pembiayaan, dan belanja yang telah dijumlah. Setelah itu kepenghuluan pujud membuat laporan kekayaan milik desa untuk mengetahui aset bersih desa per 31 desember.

Permasalahan terdapat pada laporan kekayaan milik kepenghuluan pujud dimana kepenghuluan pujud memiliki persediaan seperti Alat tulis kantor senilai Rp. 4.266.500 (lampiran 1), benda pos/Materai senilai Rp. 900.000 (lampiran 1), dan Alat dan bahan kebersihan senilai Rp. 325.000 (lampiran 1) untuk tahun 2018. Pada tahun 2019 persediaan alat tulis kantor Rp. 5.020.000 (lampiran 1), benda pos/Materai senilai Rp. 1.050.000 (lampiran 1), dan Alat dan bahan

kebersihan senilai Rp. 405.000 (lampiran 1). Namun kepenghulun pujud tidak menghitung nilai perediaan tersebut diakhir periode sehingga saldo persediaan pada laporan kekayaan milik kepenghuluan pujud senilai Rp. 0 (lampiran 2).

Kepenghuluan pujud juga tidak menyajikan aset tetap tahun sebelumnya ke tahun penyajian, seperti aset tetap pada tahun 2018 sebesar Rp. 509.665.000 (lampiran 1) tidak diinput ke tahun 2019. Hal ini dapat berdampak pada laporan kekayaan milik kepenghuluan pujud yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepenghuluan pujud juga tidak melakukan penyusutan pada aset tetap seperti peralatan dan mesin.

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah yaitu :

Apakah penerapan akuntansi desa pada Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Beterima Umum (PABU).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi desa kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan Pinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Bentuk dari pengaplikasian pengetahuan yang telah didapatkan saat perkuliahan, serta menambah wawasan tentang akuntansi desa pada kepenghuluan pujud tersebut.

2. Bagi penelitian sejenis

Dapat memberikan tambahan ilmu untuk kemajuan akademis, dan juga dapat menjadi acuan dalam penelitian yang sejenis.

3. Bagi kantor Kepenghuluan Pujud

Sebagai bahan pertimbangan atau masukkan dalam perkembangan penereapan akuntansi desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang telaah pustaka dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

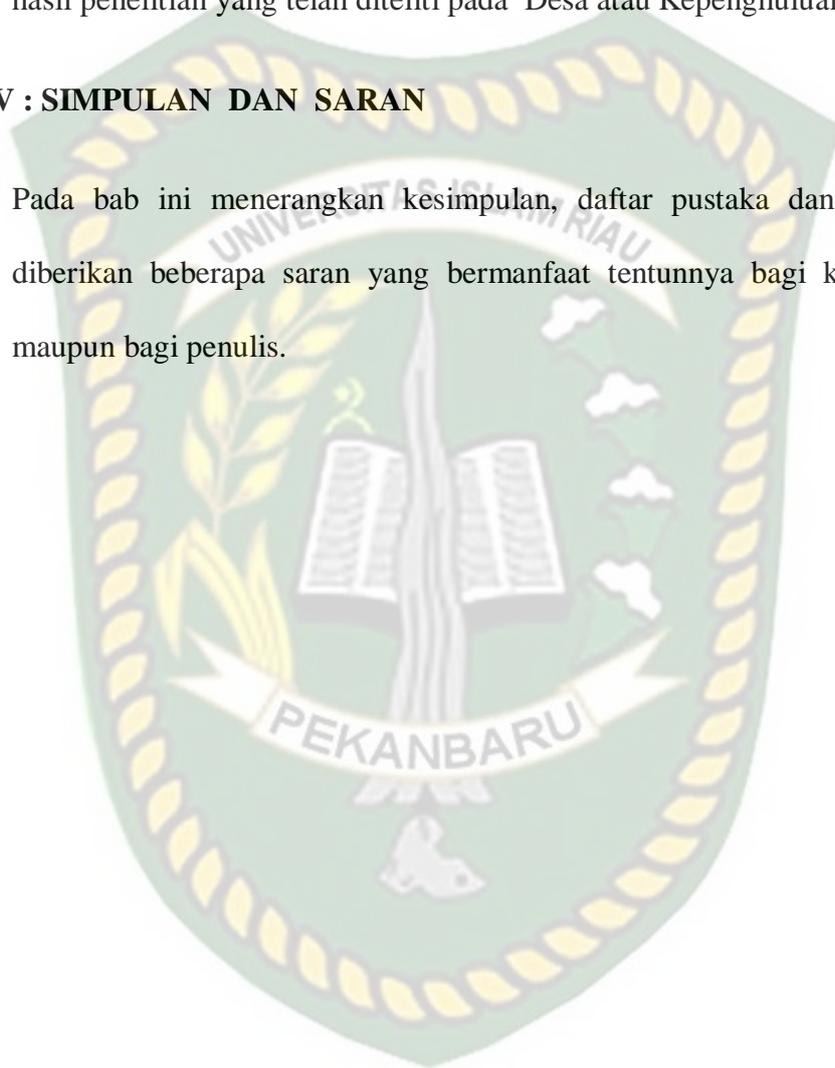
Pada bab ini menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah dari objek penelitian dan membahas hasil penelitian yang telah diteliti pada Desa atau Kepenghuluan Pujud.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menerangkan kesimpulan, daftar pustaka dan kemudian diberikan beberapa saran yang bermanfaat tentunya bagi kantor desa maupun bagi penulis.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Bastian (2015: 6), “Desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rural). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain”.

Menurut Bastian (2015: 8), “Ciri-ciri pedesaan antara lain:

1. Kepadatan penduduk rendah.
2. Kegiatan di pedesaan didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, dan kolam ikan.
3. Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ular, dan sebagainya.
4. Penduduk terkonsentrasi dalam bentuk kluster yang disebut desa.
5. Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu.
6. Desa adalah sejumlah orang yang ditinggali pada suatu wilayah yang saling mengenal, mempunyai adat istiadat relatif sama, hidup bergotong royong, dan memiliki tata cara peraturan sendiri dalam mengatur kehidupan terhadap masyarakat desa. (Nurcholis 2011:2)

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Masyarakat desa umumnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Penduduknya sebagian

besar bekerja di sektor informal yang didominasi pada sektor pertanian dan peternakan. Selain itu masyarakat memiliki hubungan yang akrab dan saling membantu satu sama lain.

2.1.2 Pengertian Akuntansi dan PSAK

Menurut Muhtar Yahya (2020:1) Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat lalu mengomunikasikan berabagai kejadian ekonomi dari suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Dalam proses identifikasi tersebut, akan dilakukan seleksi atas aktivitas ekonomi yang relevan dengan kegiatan sebuah entitas. Setelah teridentifikasi, maka transaksi keuangan tersebut akan dicatat dalam sebuah pembukuan yang sistematis dan kronologis. Proses pencatatan ini mencakup kegiatan klasifikasi dan ikhtisar dari semua pembukuan yang ada nilai ekonomis (uang). Selanjutnya setelah data keuangan tersebut diidentifikasi dan dicatat, maka selanjutnya akan dikomunikasikan kepada para pihak yang berkepentingan. Bentuk sajian informasi akuntansi ini sering dinamakan laporan keuangan.

Kemudian menurut Eddy Purnairawan (2021:1) Akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat PSAK merupakan kerangka prosedur rujukan yang menunjang pembuatan laporan keuangan. PSAK berisi bermacam-macam aturan yang berhubungan dengan aktivitas pencatatan, penyusunan, pelaksanaan, serta penajian sebuah laporan. Dalam penelitian ini

mengambil PSAK 14 yaitu mengenai persediaan dalam menghitung sisa dari persediaan yang dibeli, dan PSAK 16 mengenai aset tetap dimana pengakuan aset tetap diakui dengan biaya perolehan yang kemudian memperoleh manfaat ekonomi masa depan, selama aset tetap memiliki nilai ekonomi maka akan tetap dilakukan penyusutan atas aset tetap tersebut.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Desa

Akuntansi desa merupakan proses akuntansi yang dilakukan pada desa, yang mana desa itu berhak menerima dan mengelola dana dari pemerintah pusat maupun daerah, desa harus mempetanggungjawabkan dana yang dikelola itu dengan membuat laporan pertanggungjawaban, karena didesa juga ada masyarakat yang berhak mengetahui bagaimana kinerja pemerintah desa karena itu juga demi kepentingan masyarakat.

Akuntansi Desa adalah “ pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan. (Sujarweni, 2015:17).

Sedangkan menurut Moermahadi S. Djanegara (2017:209) desa adalah Suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.4 Pemerintahan Desa

Menurut Wijaya, David (2018:50) dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang terus membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desamenyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kaur keuangan).

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mejabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus memperhatikan empat asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buka kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir

bulan. Dalam penatausahaan keuangan, Kau Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari:

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

2.1.6 Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan merupakan media penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. Laporan keuangan lazim diterbitkan secara periodik, semesteran, triwulan, bulanan, bahkan bisa harian. Laporan keuangan ini sangat dibutuhkan salah satunya pemerintahan desa, laporan keuangan ini menjadi kebutuhan utama dalam proses pengambilan keputusannya.

Laporan keuangan sector publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi baik manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Nordiawan, 2012:33).

2.1.7 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan baik itu metode, prosedur, serta ketentuan yang mengandung teori atau pun secara praktis. Prinsip akuntansi yang diperlukan menurut (IAI-KASP 2015: 7-8) Pedoman Asistensi akuntansi keuangan desa yaitu :

1. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini

bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

2.Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

3.Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4.Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

5.Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan

dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.1.8 Siklus Akuntansi

Didalam (IAI-KASP 2015: 12-13) tahapan yang terdapat pada siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desaper 31 Desember tahun tertentu.

2.1.9 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:27) “ keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Keuangan desa dikelola dalam kurun waktu satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik”.

Asas pengelelolaan keunagan desa dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu :

- a. Transparan ,merupakan keterbukaan akses informasi memungkinkan untuk masyarakat mendapatkan dan mengetahui tentang keaungan desa seluas-luasnya. Perundang-undangan mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintah desa tetap meperhatikan hak untuk mengetahuiinformasi yang jujur,tidak diskriminasi, dan benar bagi masyarakat.
- b. Akuntabel, merupakan menndapatkan perwujudandalam rangka mencapai tujuan pengendalian sumber daya, mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

kebijakan pelaksanaanyang telah dipercayakan. Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan menjelaskan bahwa setiap hasil akhir kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah desayang telah disusun dan dikerjakan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

- c. Partisipatif, merupakanmengikat penyelenggaraan pemerintah desa yang berdasarkan tentang unsur-unsur masyarakat desa dan kelembagaan masyarakatdesa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, merupakan yang dilandasi tentang pedoman atau aturan untuk pengelolaan keuangan desa.

2.1.10 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:46-51) adalah sebagai berikut :

1. Basis Kas (*Cash Basis*) Basis kas merupakan pencatatan suatukonsep dalam akuntansi yang sangat penting pada saat taransaksi telah terjadi menggunakan pencatatan teknik basis kas dan uang benar-benar telah diterima atau dikeluarkanpada saat terjadi transaksi.
2. Basis Akrual (*Accrual Basis*) Basis akrual merupakan tanpa memperhatikan pencatatan transaksi pada saat dicatat baik itukas atau setara kas telah diterima atau telah dibayarkan. Dengan maksud lain basis akrual dapat digunakan mengukur atas asset, kewajiban dan ekuitas.
3. Basis Kas Miodifikasian (*Modified Cash Basis*) Basis kas modifikasi merupakan transaksi yang dicatat tertentu selama tahun anggaran dan membuat penyesuaian dalam akhir tahun pada berdasarkan atas basis akrual yang telah dimodifikasi.

4. Basis AkruaI ModikasiaI (*Modified Accrual Basis*) Basis akruaI modikasiaI merupakan transaksi yang dicatat tertentu dengan menggunakan basis kas dan menggunakan basis akruaI untuk sebagian besar pencatatan transaksi. Kepraktisan pencaatatan transaksi dilandasi atas pembatasan penggunaan dasar akruaI.

2.1.11 Sistem Pencatatan Keuangan Desa

Sistem pencatatan yang dapat digunakan dalam membuat laporan pada keuangan desa yaitu :

a. Single Entry

Sistem ini melakukan pencatatan transaksinya hanya satu kali, karena ketika terjadi transaksi kas masuk maka akan dicatat pada buku penerimaan dan sebaliknya jika terjadi transaksi kas keluar maka dicatat dalam buku pengeluaran.

b. Double Entry

Pada sistem ini terdapat kolom debit dan kredit. Nilai dari kolom debit dan kredit ini harus sama atau seimbang karena menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Sistem pencatatan ini mempunyai istilah yaitu menjurnal.

c. Triple Entry

Pada sistem pencatatan ini sama dengan *Double Entry* yang memiliki sisi debit dan kredit, namun pada metode ini ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Bahwa Penerapan Akuntansi Desa Pada Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dipekirakan belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



BAB III

MEOTDE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, metode ini dibagi 4 tahap yaitu :

a. Perencanaan

Pada tahap ini membuat analisis standar sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai human instrument mencari informasi data, seperti melakukan wawancara dengan pihak kepenghuluan pujud.

c. Analisis Data

Setelah mendapatkan data peneliti kembali melakukan wawancara mendalam terhadap kemungkinan adanya permasalahan dari data tersebut.

d. Evaluasi

Setelah semua data masalah, kekurangan, kelebihan, dari akuntansi desa yang diterapkan kepenghuluan pujud telah dianalisis, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat penelitian bagi pihak desa maupun bagi penulis.

3.2 Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa atau Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data langsung yang diambil penulis dengan cara wawancara lisan pada bagian keuangan terkait penerapan akuntansi Desa pada Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data yang diambil dari laporan yang telah disusun oleh kantor kepenghuluan pujud kecamatan pujud tahun 2018 dan 2019.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh langsung informasi atau data data lainnya dari sumbernya, seperti melakukan tanya jawab dengan pihak kepenghuluan pujud yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi atau kelembagaan. Setelah dengan adanya dokumentasi ini dokumen-dokumen seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, laporan realisasi anggaran penapatan dan belanja, dan laporan kekayaan milik desa yang telah dikumpulkan dari objek penelitian kemudian dianalisis hubungannya dengan penerapan Akuntansi Desa pada kepenghuluan pujud ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan data yang berkaitan kemudian dikelompokkan dan disusun agar dapat diteliti dengan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan permasalahan akuntansi desa ini yang nantinya akan diambil keputusan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kepenghuluan Pujud

Pada jaman dahulu Kepenghuluan Pujud terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari Karet, Sawit, padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, hingga palawija. Konon tanah di Kepenghuluan Pujud sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat Kepenghuluanpun bisa dikatakan bisa makmur.

Asal mula pemberian nama Kepenghuluan ini bermula dari musyawarah yang dilakukan para tokoh agama dan tokoh pucuk suku adat istiadat desa pujud, Yaitu Kh. YUNUS (Alm), Kh.MUSA (Alm), H. DARONI (Alm) dan Tokoh tetua adat masyarakat kepenghuluan Pujud Yaitu H. ILYAS ABBAS (alm), H. ROZALI SOMAD, H. ISMAIL, DABARNUS Dan masih banyak tokoh agama dan tokoh adat yang tidak disebutkan nama nya. Dari keenam tokoh agama dan tokoh adat yang paling banyak dikenal masyarakat dan disegani sesama warga yang mana mereka sangat berpengaruh dalam sejarah kepenghuluan pujud. Dan dari musyawarah yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa Kepenghuluan ini diberi nama Kepenghuluan Pujud. Atas jasa-jasa dalam memimpin dan membimbing masyarakat terutama pada bidang agama.

Kepenghuluan inipun kemudian dibagi menjadi enam dusun yang masing-masing diberi nama Dusun I Kampung Pinang, Dusun II Kampung Tengah, Dusun III Kampung Tiga, Dusun IV Kampung Tiga Utara, Dusun V Sosopan dan Dusun VI Sosopan Barat. Dimana nama-nama dusun tersebut diambil dari Asal

Mula Pujud. Hal itu juga sebagai bentuk penghargaan masyarakat terhadap kepemimpinan paratokoh agama yang ada di Kepenghuluan ini.

4.1.2 Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Desa Pujud merupakan Desa Transmigrasi dan salah satu desa dari 10 Desa yang ada di kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Letak geografi Desa Pujud, terletak diantara :

Sebelah Utara berbatasan dengan :	Desa Pematang Genting.
Sebelah Selatan berbatasan dengan :	Desa Kelurahan Pujud Selatan.
Sebelah Barat berbatasan dengan :	Desa Kasang Bangsawan.
Sebelah Timur berbatasan dengan :	Desa Sungai Pinang.

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman :	84 Ha
2. Pertanian/Perkebunan :	8.160 Ha
3. Ladang/tegalan :	-
4. Hutan :	-
5. Rawa-rawa :	-
6. Perkantoran :	0,40 Ha
7. Sekolah :	6 Ha
8. Jalan :	15,75 Ha
9. Lapangan Sepak Bola :	1 Ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	12 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	20 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	200 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	3 Jam

d) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

1. Kepala Keluarga	717 KK
2. Laki-laki	1.459 Orang
3. Perempuan	1.367 Orang

4.1.3 Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. SD/MI	384 Orang
2. SLTP/ MTS	327 Orang
3. SLTA/ MA	388 Orang
4. S1/ Diploma	62 Orang
5. Putus Sekolah	5 Orang
6. Buta Huruf	2 Orang

b). Lembaga Pendidikan.

1. TK/PAUD	4 Buah
2. SD/MI	3 Buah
3. SLTP/MTs	1 Buah
4. SLTA/MA	2 Buah
5. PDTA	2 Buah

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	25 Orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	2 Orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah Ibu melahirkan tahun ini	25 Orang
2. Jumlah Ibu melahirkan meninggal tahun ini	0 Orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3	55 Orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1	66 Orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar	54 Orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita	17 Orang
2. Balita gizi buruk	0 Orang
3. Balita gizi baik	15 Orang
4. Balita gizi kurang	2 Orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian	17 KK
2. Pengguna air PAH	0 KK
3. Pengguna sumur pompa	350 KK
4. Pengguna sumur hidran	0 KK
5. Pengguna air sungai	7 KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan

Islam	2.807 Orang
Katolik	0 Orang
Kristen	30 Orang
Hindu – Budha	0 Orang

2. Data Tempat Ibadah

Masjid	5 Buah
Musholla	2 Buah
Gereja	0 Buah
Pura	0 Buah
Vihara	0 Buah

4.1.4 Kondisi Pemerintah Kepenghuluan

a. Pembagian Wilayah Desa

Kepenghuluan Pujud Tebarbagi dalam 7 Dusun terdiri dari :

Dusun I	Berjumlah, 3 RW dan 6 RT
Dusun II	Berjumlah, 3 RW dan 6 RT
Dusun III	Berjumlah, 3 RW dan 7 RT
Dusun IV	Berjumlah, 2 RW dan 4 RT
Dusun V	Berjumlah, 2 RW dan 5 RT
Dusun VI	Berjumlah, 2 RW dan 5 RT
Dusun VII	Berjumlah, 2 RW dan 2 RT

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan

1. Lembaga Pemerintahan Kepenghuluan

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa	1 Orang
2. Sekretaris Desa	1 Orang

3. Perangkat Desa	13 Orang
-------------------	----------

2. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

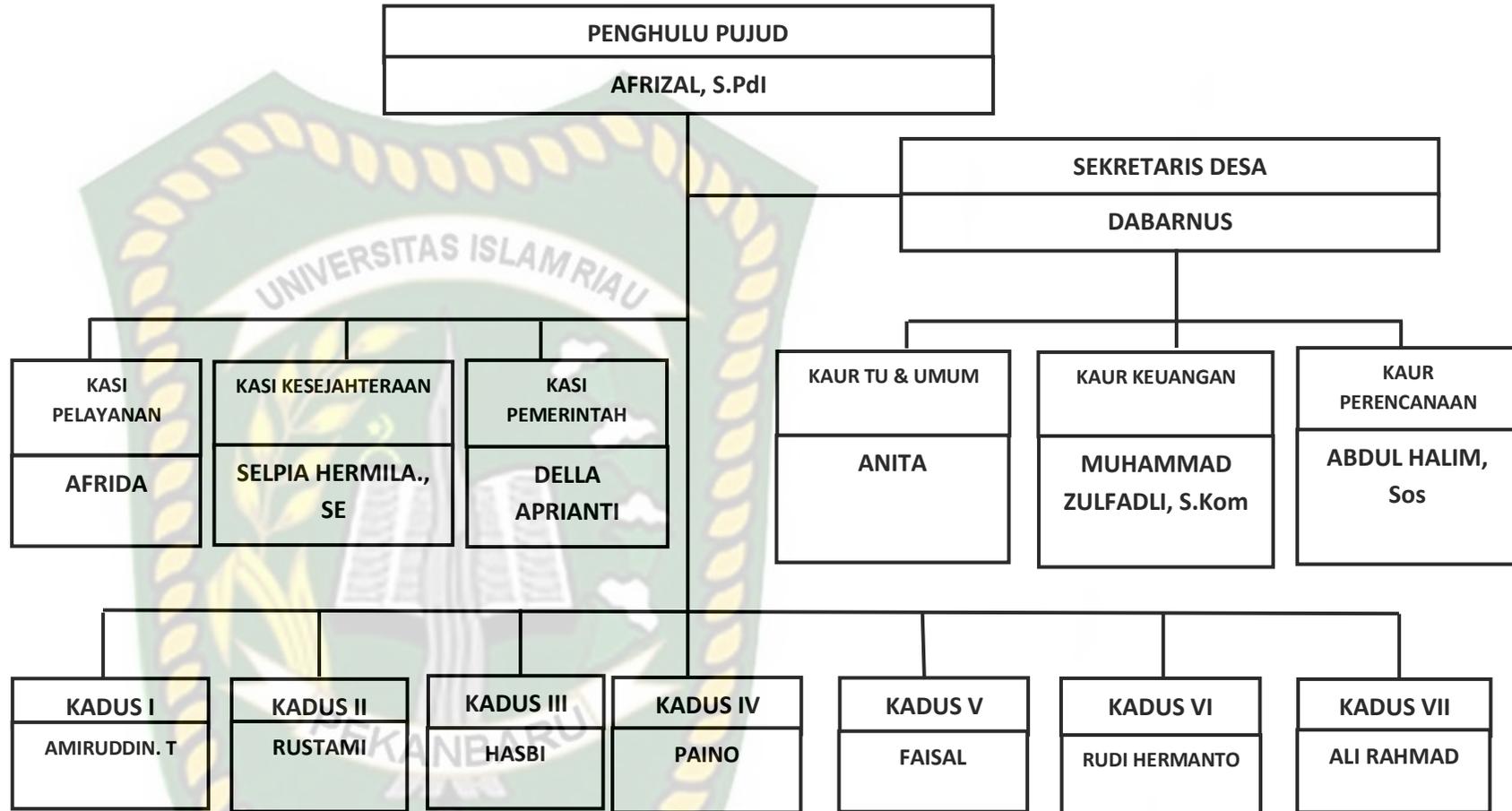
Jumlah Anggota BPD : 7 Orang

3. Lembaga Kemasyarakatan

LPM	11 Lembaga
PKK	1 Lembaga
Posyandu	4 Kelompok
Pengajian	6 Kelompok
Arisan	6 Kelompok
Simpan Pinjam	1 Kelompok
Kelompok Tani	0 Kelompok
Gapoktan	0 Kelompok
Karang Taruna	1 Kelompok
Risma	0 Kelompok
Ormas/LSM	0 Kelompok
Lain-lain	0 Kelompok

4.1.5 Struktur Organisasi Kepenghuluan Pujud

Gambar 4.1



4.1.6 Masalah dan Potensi Desa

1. Masalah Desa

Masalah desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 *tools Participatory Rural Appraisal* (PRA) yakni peta social desa, kalender musim dan diagram/ bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum kepenghuluan pujud dijabarkan sebagai berikut:

a. Bidang infrakstruktur desa/sarana prasarana

1. Keberadaan tiang dan jaringan listrik sudah memadai.
2. Kebutuhan akan *Box Culvert* dan jembatan belum terpenuhi.
3. Pembangunan sudah merata
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan.
5. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
6. Belum adanya pasar desa.
7. Kapasitas tenaga ahli dibidang pembangunan belum memadai.

b. Bidang pendidikan

1. Minat baca masyarakat kurang.
2. Honor guru masih kurang.
3. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi sudah ada.
4. Masih ada anak putus sekolah.
5. Sarana dan prasarana pendidikan non formal sudah ada.

c. Bidang ekonomi

1. Sudah ada pembangunan potensi ekonomi desa.
2. Lembaga ekonomi (UED SP) sudah tidak beroperasi lagi.
3. Sudah terlaksananya pelatihan—pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha.
4. Sudah adanya penghasilan asli desa (PADES).
5. Rendahnya harga komoditas sawit yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
6. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) sudah terbentuk.
7. Tingginya harga kebutuhan pokok.

d. Bidang sosial budaya

1. Adanya indikasi pengguna narkoba dikalangan remaja.
2. Pendidikan akhlak dan moral tidak terabaikan.
3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal.
4. Sudah optimalnya pengembangan budaya lokal desa.

e. Bidang pemerintahan

1. Pelayanan masyarakat sudah optimal.
2. Regulasi desa sudah dibuat dan terdokumentasi dengan baik.
3. Administrasi desa yang sudah dimanfaatkan secara optimal.
4. Insentif yang diterima oleh aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya sudah memadai.
5. Sudah adanya tenaga teknis pemberdayaan.

f. Bidang kesehatan

1. Pemanfaatan posyandu sudah optimal.
2. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan cukup.
3. Keadaran akan pentingnya makanan bergizi sudah memadai.
4. Penggunaan poskesdes sudah optimal.
5. Air bersih sudah tersedia.
6. Sudah tersedianya sarana pelayanan kesehatan (PUSTU)

g. Bidang kelembagaan

1. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa sudah cukup baik.
2. Tingkat pertemuan/rapat- rapat cukup baik.
3. Sudah tersusunnya rencana dan program kerja.
4. Pembinaan dan pendampingan desa cukup memadai.

h. Bidang kamtibmas

1. Sudah optimalnya kegiatan siskamling.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan.
3. Sifat kebersamaan dan gotong royong cukup baik.
4. Perlengkapan LINMAS sudah memadai.

i. Bidang lingkungan hidup

1. Lahan tidur (semak belukar) yang sudah tergarap.

j. Bidang partisipasi masyarakat

1. Cukup baik kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat atau musyawarah yang diadakan didesa.

2. Dilaksanakan oleh pemerintah desa.
 3. Kegiatan gotong royong cukup baik.
 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
 5. Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa cukup baik.
- k. Bidang pertanian
1. Penyuluhan dan pelatihan yang cukup.
 2. Harga komoditas perkebunan terutama sawit rendah.
 3. Sudah optimalnya penggarapan bidang perternakan.
- l. Bidang hukum dan HAM
1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum.
 2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- m. Bidang perindustrian dan perdagangan
1. Home industri belum dikembangkan.
 2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha.
 3. Semangat berwirausaha belum optimal.
 4. SDM dibidang pengembangan usaha kecil masih rendah.
 5. Kurangnya sarana dan prasarana bidang pengembangan usaha belum memadai.
- n. Bidang pertahanan
1. Tingginya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
 2. Partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada desa untuk pembangunan cukup baik.

3. Batas wilayah desa sudah jelas.

o. Bidang informasi dan komunikasi

1. Desa memiliki sistem informasi desa.

2. Pemerintah desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil MUSRENBANG kabupaten/provinsi dan atau dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga program apa saja yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.

3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) desa, baik dari dana desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan kabupaten/provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

2. Potensi Desa

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada didesa dan dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum digarap.

a. Potensi sumberdaya alam

1. Lahan kosong.

2. Ikan air tawar (ikan rawa).

3. Perkebunan sawit.

4. Perternakan

b. Potensi sumberdaya manusia

1. Aparatur desa.
2. BPD.
3. Kelembagaan desa.
4. Kader desa.
5. Kader posyandu.
6. Kader PKK.
7. Pendamping desa.
8. Tenaga pendidik.
9. Tokoh agama dan tokoh masyarakat.
10. Penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, dll.
11. Aparat keamanan (LINMAS).
12. Pemuda.
13. Klub-klub olahraga.

c. Sumberdaya social

1. Majelis taklim.
2. Wirid yasin.
3. Guru-guru agama .
4. Fasilitas pendidikan agama.
5. Masjid dan mushalla.
6. Fasilitas pendidikan umum.
7. Peringatan hari besar islam.
8. Tokoh masyarakat.

9. Tokoh pemuda.

d. Sumberdaya ekonomi

1. Lahan pertanian.
2. Lahan perkebunan.
3. Kolam ikan.
4. Ikan rawa.
5. Pedagang dan swasta.
6. Home industry.
7. Sarana produksi lainnya.

4.1.7 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi kepenghuluan pujud ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan didesa kepenghuluan pujud seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal didesa seperti satuan kerja wilayah pembangunan dikecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar dapat dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun juga menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan kepenghuluan pujud.

1. Visi desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi kepenghuluan pujud yaitu :

“Terwujudnya pelayanan-pelayanan prima dan pemerataan pembangunan yang merata serta terciptanya lingkungan hidup yang berbudaya dan agamis”

2. Misi desa

Untuk mencapai tujuan dari visi diatas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut diatas sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana daerah yang mendukung peningkatan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan kepenghuluan yang berkelanjutan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem pencatatan dan dasar pengakuan

Sistem pencatatan yang digunakan kepenghuluan pujud dalam mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuannya, yaitu sistem *single entry*, atau semua transaksi dicatat dalam pembukuan dengan *single entry* atau tata buku tunggal.

Dasar pengakuan yang digunakan kepenghuluan pujud yaitu *cash basis*, karena kepenghuluan pujud pencatatannya baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. Seperti untuk pengakuan pendapatan dan beban dimana pendapatan dan beban dicatat disaat pendapatan itu diterima dan saat beban dikeluarkan. Dalam bahasa yang lain, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembayaran.

4.2.2. Tahap pencatatan

Dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada pembukuan, Kepenghuluan Pujud menggunakan sistem pencatatan tata buku tunggal atau single entry. Dan untuk pengakuan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum Kepenghuluan Pujud menggunakan Cash Basis, dimana Kepenghuluan Pujud baru mencatat ketika transaksi terjadi.

Kepenghuluan pujud memulai proses akuntansinya dari transaksi yang terjadi dengan adanya bukti transaksi kemudian mencatat transaksi tersebut pada Buku Kas Umum (lampiran 3), Buku Bank (lampiran 4), dan Buku Pembantu Pajak (lampiran 5).

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum (lampiran 3) merupakan tempat pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum yang dilakukan Kepenghuluan Pujud telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Tabel 4.1
Buku Kas Umum Kepenghuluan Pujud
Tahun Anggaran 2019

No.	Tgl.	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	No. Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo
1	01-10-19		Saldo Bank Riau Kepri	4.110.192		001		4.110.192
2	16-10-19		Dr.0113020002002772/SP2D/LS/3	136.205.890		002		140.316.082
3	17-10-19		Penghasilan tetap penghulu dan perangkat kepenghuluan		13.200.000	003	13.200.000	127.116.082
4	17-10-19		Tunjangan penghulu dan perangkat kepenghuluan		62.000.000	004	62.000.000	65.116.082
5	17-10-19		Tunjangan ketua dan anggota BPK Kepenghuluan		17.200.000	005	17.200.000	47.916.082
6	17-10-19		Insentif ketua RW		12.000.000	006	12.000.000	35.916.082
7	17-10-19		Insentif ketua RT		27.750.000	007	27.750.000	8.166.082
8	17-10-19		Biaya operasional kantor		3.055.000	008	3.055.000	5.111.082
9	17-10-19		Biaya operasional BPKep		1.000.000	009	1.000.000	4.111.082

10	31-10-19		Jasa Giro	1.690		010		4.112.772
11	31-10-19		Ke 01130200020		1.690	011		4.111.082

Sumber : Data Kepenghuluan Pujud

2. Buku Bank

Buku Bank (lampiran 4) merupakan buku yang digunakan untuk mencatat kas masuk dan keluar dibank. Dalam pencatatan Buku Bank yang dilakukan Kepenghuluan Pujud telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Beterima Umum.

Tabel 4.2

Buku Bank Kepenghuluan Pujud

Tahun Anggaran 2019

No	Tgl. Transaksi	Uraian transaksi	Bukti transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya ADM (Rp)	
1	01-10 -2019	Saldo bulan oktober							894.010
2	16-10	Dr.01130200020	47.88.19871	136.205.890		0.00			137.099.900

	-2019								
3	17-10	WM0453983	47.89.99946			136.205.000			894.900
	-2019	M.ZULFADLI/08							
4	31-10	Jasa Giro	30.10.07183	1.690					896.590
	-2019								
5	31-10	Ke 01130200020	30.10.07184			1.690			894.900
	-2019								
Total Transaksi Bulan Ini				1.690					894.900
Total Transaksi Kumulatif					1.690				894.900

Sumber : Data Kepenghuluan Pujud

3. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak (lampiran 5) merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran pajak, dimana didalam buku pembantu pajak ini berisikan nomor urut penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam mencatat buku pembantu pajak kepenghuluan pujud telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Tabel 4.3
Buku Pembantu Pajak Kepenghuluan Pujud
Tahun Anggaran 2019

No.	Tanggal	Uraian	Pemungutan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	27-03-19	Dipungut PPh pasal 21 atas honorium TPK Penyusunan RKPKep	15.000		15.000
2		Disetor PPh pasal 21 atas honorium TPK Penyusunan RKPKep		0	
3	27-03-19	Dipungut PPN atas belanja makanan dan minuman kegiatan penyusunan APBKep 2018	238.636		238.636
4		Disetor PPN atas belanja makanan dan minuman kegiatan penyusunan APBKep 2018		0	
5	27-03-19	Dipungut PPh pasal 21 atas honorium TPK	21.250		21.250
6		Disetor PPh pasal 21 atas honorium TPK		0	
7	27-03-19	Dipungut PPN atas belanja makanan dan minuman kegiatan LPJKep	90.682		90.682
8		Disetor PPN atas belanja makanan dan minuman kegiatan LPJKep		0	

9	29-03-19	Dipungut PPN atas belanja makanan dan minuman kegiatan LPMKep	159.091		159.091
		Disetor PPN atas belanja makanan dan minuman kegiatan LPMKep		0	
Jumlah			524.659	0	524.659

Sumber : Data Kepenghuluan Pujud.

4.2.3. Tahap Penggolongan

Dalam tahap penggolongan setelah setiap transaksi yang terjadi terkait dengan penerimaan pendapatan atau pengeluaran belanja dan penerimaan atau pengeluaran lainnya dicatat pada Buku Kas Umum, selanjutnya semua transaksi yang telah dilakukan pencatatan dibukukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Namun, kepenghuluan pujud tidak membuat atau mencatat transaksinya ke dalam buku besar dan buku besar pembantu yang berarti belum sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Berikut contoh buku besar yang dapat dibuat kepenghuluan pujud :

Tabel 4.4
Buku Besar Kepenghuluan Pujud

Nama Akun : Kas di Bendahara

Tgl.	No. Akun	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	
						Debit (Rp)	Kredit (Rp)
16-10-19		Kas Bendahara Kepenghuluan Pujud		140.316.082		140.316.082	
17-10-19		Siltap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan			13.200.000	127.116,082	
17-10-19		Tunjaman Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan			62.000.000	65.116.082	
17-10-19		Tunjangan Ketua dan Anggota BPK Kepenghuluan			17.200.000	47.916.082	
17-10-19		Insentif Ketua RW			12.000.000	35.916.082	

		Kepenghuluan					
17-10-19		Insentif Ketua RT Kepenghuluan			27.750.000	8.166.082	
17-10-19		Biaya Operasional Kantor			3.055.000	5.111.082	
17-10-19		Biaya Operasional BPKep			1.000.000	4.111.082	

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.5
Buku Besar Kepenghuluan Pujud

Nama Akun : Pendapatan Transfer

Tgl.	No. Akun	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	
						Debit (Rp)	Kredit (Rp)
16-10-19		Penerimaan Dana Kepenghuluan			140.316.082		140.316.082

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.6
Buku Besar Kepenghuluan Pujud

Nama Akun : Belanja Siltap dan Tunjangan

Tgl.	No. Akun	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	
						Debit (Rp)	Kredit (Rp)
17-10-19		Siltap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan		13.200.000		13.200.000	
17-10-19		Tunjamgan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan		62.000.000		75.200.000	
17-10-19		Tunjangan Ketua dan Anggota BPK Kepenghuluan		17.200.000		92.400.000	
17-10-19		Insentif Ketua RW		12.000.000		104.400.000	
17-10-19		Insentif Ketua RT		27.750.000		132.150.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.7
Buku Besar Kepenghuluan Pujud

Nama Akun : Belanja Operasional

Tgl.	No. Akun	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	
						Debit (Rp)	Kredit (Rp)
17-10-19		Biaya Operasional Kantor		3.055.000		3.055.000	
17-10-19		Biaya Operasional BPKep		1.000.000		4.055.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Pada contoh buku besar penulis mencatat dengan mengikuti IAI-KASP Tahun 2015, yang angka dalam mencatat buku besarnya penulis ambil dari buku kas umum yang dicatat oleh kepenghuluan pujud sebagai contoh pemostingan buku besar yang dapat dibuat oleh kepenghuluan pujud.

4.2.4. Tahap Pengikhtisaran

Selanjutnya membuat neraca saldo dan neraca lajur dimana angka nerca saldo diambil dari buku besar.

1. Neraca saldo

Pencatatan kedalam neraca saldo digunakan untuk meyakinkan bahwa proses pencatatan yang dilakukan sudah benar yang dapat dijadikan koreksi jika terjadi kekeliruan dalam pencatatan. Neraca saldo juga mempermudah dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Namun, kepenghuluan pujud tidak mencatat neraca saldo yang berarti pada tahap ini kepenghuluan pujud belum sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Berikut contoh neraca saldo yang dapat dibuat kepenghuluan pujud :

Tabel 4.8
Neraca Saldo Kepenghuluan Pujud
Tahun Anggaran 2019

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1	Kas Desa :		
1.1.1.01	a). Kas Bendahara Kepenghuluan		0

1.1.1.02	b) Rekening Kas Kepenghuluan	8.109.118	
1.1.2	Piutang :		
1.1.2.01	a). Piutang Sewa Tanah	0	
1.1.2.02	b). Piutang Sewa Gedung	0	
1.1.3	Persediaan :		
1.1.3.01	a). Benda Pos dan Material	0	
1.1.3.02	b). Alat Tulis Kantor	0	
1.2	Investasi Jangka Panjang :		
1.2.1	a). Penyertaan Modal Pemerintah Kepenghuluan	136.000.000	
1.3	Aset Tetap :		
1.3.1	a). Tanah	0	
1.3.2	b). Peralatan dan Mesin	61.500.000	
1.3.3	c). Gedung dan Bangunan	0	
1.3.4	d). Jalan, Jaringan dan Instalasi	645.257.000	
1.4	Dana Cadangan	0	
1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya	0	
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		0

4.2	Pendapatan Transfer :		
4.2.1	a). Dana Kepenghuluan		821.876.000
4.2.2	b). Bagi Hasil Pajak/Retribusi		0
4.2.3	c). Alokasi Dana Kepenghuluan		1.221.640.515
4.2.4	d). Bantuan Provinsi		200.000.000
1	Bidang Penyelenggara Pemerintah Kepenghuluan :		
1.1	a). Belanja siltap, Tunjangan dan Op Pemdes	690.285.000	
1.2	b). Sarana dan Prasarana Pemdes	41.500.000	
1.3	c). Adm Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik, dan Kearsipan	26.289.600	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :		
2.1	a). Bidang Pendidikan	20.400.000	
2.1	b). Bidang Kesehatan	30.000.000	
2.3	c). Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.274.500	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :		

3.1	a). Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan kepenghuluan	33.200.000	
3.2	b). Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	103.000.000	
3.3	c). Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000	
3.4	d). Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.000.000	
4.1	Penerimaan Pembiayaan :		
	a.). SILPA		210.298.700
	Total	2.453.815.220	2.453.815.220

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Contoh neraca saldo yang dibuat penulis juga mengikuti IAI-KASP Tahun 2015, yang angka nya penulis ambil dari laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran kepenghuluan dan laporan kekayaan milik kepenghuluan yang dibuat oleh kepenghuluan pujud sebagai contoh neraca saldo yang dapat dibuat oleh kepenghuluan pujud.

2. Neraca Lajur

Selanjutnya dibuat neraca lajur atau kertas kerja yang angka disajikan diambil dari Neraca Saldo seluruh Buku Besar dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan. Neraca lajur ini juga dapat mempermudah dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Kepenghuluan pujud

belum sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, karena kepenghuluan pujud juga tidak membuat neraca lajur dalam proses akuntansinya.

Berikut contoh Neraca Lajur yang dapat dibuat Kepenghuluan Pujud :

Tabel 4.9
Neraca Lajur Kepenghuluan Pujud
Tahun Anggaran 2019

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Laporan Realisasi APBDes		Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.1.1	Kas Desa :								
1.1.1.01	a). Kas Bendahara Kepenghuluan								
1.1.1.02	b) Rekening	8.109.118						8.109.118	

	Kas Kepenghuluan								
1.1.2	Piutang :								
1.1.2.01	a). Piutang Sewa Tanah	0						0	
1.1.2.02	b). Piutang Sewa Gedung	0						0	
1.1.3	Persediaan :								
1.1.3.01	a). Benda Pos dan Material	0						0	
1.1.3.02	b). Alat Tulis Kantor	0						0	
1.2	Investasi Jangka Panjang								
1.2.1	a). Penyertaan Modal Pemerintah Kepenghuluan	136.000.000						136.000.000	

1.3	Aset Tetap :							
1.3.1	a). Tanah	0					0	
1.3.2	b). Peralatan dan Mesin	61.500.000					61.500.000	
1.3.3	c). Gedung dan Bangunan	0					0	
1.3.4	d). Jalan, Jaringan dan Instalasi	645.257.000					645.257.000	
1.4	Dana Cadangan	0					0	
1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya	0					0	
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	0						0
4.2	Pendapatan Transfer :							
4.2.1	a). Dana		821.726.000			821.726.000		

4.2.2	Kepenghuluan b). Bagi Hasil Pajak/Retribusi		0			0		
4.2.3	c). Alokasi Dana Kepenghuluan		875.796.019			875.796.019		
4.2.4	d). Bantuan Provinsi		200.000.000			200.000.000		
1	Bidang Penyelenggara Pemerintah Kepenghuluan :							
1.1	a). Belanja siltap, Tunjangan dan Op Pendes	690.285.000			690.285.000			
1.2	b). Sarana dan	41.500.000			41.500.000			

1.3	Prasarana Pemdes c). Adm Kependudukan , Pencatatan sipil, Statistik, dan Kearsipan	14.409.600			14.409.600			
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :							
2.1	a). Bidang Pendidikan	20.400.000			20.400.000			
2.1	b). Bidang Kesehatan	30.000.000			30.000.000			
2.3	c). Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	570.697.000			570.697.000			

	Ruangan								
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :								
3.1	a). Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan kepenghulu an	28.330.000				28.330.000			
3.2	b). Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	76.000.000				76.000.000			
3.3	c). Bidang	0				0			

	Kepemudaan dan Olahraga								
3.4	d). Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000				10.000.000			
4.1	Penerimaan Pembiayaan : a.). SILPA		210.298.700				210.298.700		

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Untuk neraca lajur yang dibuat penulis juga mengikuti IAI-KASP Tahun 2015, yang angka nya penulis ambil dari laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran kepenghuluan dan laporan kekayaan milik kepenghuluan yang dibuat oleh kepenghuluan pujud sebagai contoh neraca saldo yang dapat dibuat oleh kepenghuluan pujud, yang seharusnya neraca lajur ini mempermudah dalam menyusun dari laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran kepenghuluan dan laporan kekayaan milik kepenghuluan.

4.2.5. Data Penyesuaian

Dalam menyusun laporan keuangan kepenghuluan pujud tidak menghitung akumulasi data penyesuaian, seperti menghitung penyusutan Aset Tetap dan penyesuaian pada Persediaan.

1. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang harus dilakukan penyusutan setiap tahun, karena aset tetap kecuali tanah akan mengalami penurunan masa manfaat. Maka dalam pelaporan keuangan perlu dilakukan penghitungan pada penyusutan aset agar nilai yang dicantumkan pada laporan adalah nilai sebenarnya.

Pada PSAK 16 aset tetap diakui dengan biaya perolehan yang kemudian memperoleh manfaat ekonomi masa depan, selama aset tetap memiliki nilai ekonomi maka akan tetap dilakukan penyusutan atas aset tetap tersebut. Kepenghuluan pujud belum melakukan perhitungan pada penyusutan asetnya, sehingga aset tetap yang disajikan pada tahun 2019 (lampiran 2) tidak nilai sebenarnya karena kepenghuluan pujud belum menambahkan nilai aset tetap pada tahun sebelumnya. Berikut perhitungan penyusutan aset tetap yang dapat dibuat oleh kepenghuluan pujud dengan metode garis lurus:

Tabel 4.10

Nilai Aktiva Tetap

No.	Aset Tetap	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Peralatan dan Mesin	Rp. 68.870.000	Rp. 61.500.000
2	Jalan, jaringan dan instalasi	Rp. 440.795.000	Rp. 645.257.000

Sumber : Data olahan penulis 2021

a. Peralatan dan Mesin

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Rp.68.870.000}}{5} = \text{Rp. 13.774.000}$$

Jurnal penyesuaian dari perhitungan diatas yaitu :

Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp. 13.774.000

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp. 13.774.000

b. Jalan, jaringan dan instalasi

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Rp.440.795.000}}{20} = \text{Rp.22.039.750}$$

Jurnal penyesuaian dari perhitungan diatas yaitu :

Beban jalan, jaringan dan instalasi Rp.22.039.750

Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp.22.039.750

2. Penyesuaian Persediaan

Persediaan merupakan barang yang digunakan untuk mendukung berjalannya kegiatan operasional kepenghuluan pujud yang dimiliki oleh pemerintah kepenghuluan. Namun, kepenghuluan pujud tidak melakukan perhitungan terhadap nilai persediaan yang tersisa atau belum digunakan. Pada tahun 2018 kepenghuluan pujud memiliki nilai persediaan yang dibeli sebesar Rp. Rp.5.491.500 (lampiran 1) Dan pada tahun 2019 sebesar Rp. Rp.6.475.000 (lampiran 1), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11

Nilai Persediaan

No	Nama Persediaan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Alat tulis kantor	Rp.4.266.500	Rp.5.020.000

pendapatan dan belanja kepenghuluan juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola kepenghuluan selama satu periode. Untuk penyajian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan Pujud sudah sesuai dengan sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan

Laporan kekayaan milik kepenghuluan (lampiran 2) merupakan laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Pada kepenghuluan pujud kecamatan pujud kabupaten rokan hilir tidak memperhatikan beberapa hal dalam penyajian laporan kekayaannya, yaitu seperti tidak menghitung akumulasi penyusutan. Kemudian setelah menghitung penyusutan terhadap aset tetap, kepenghuluan pujud juga tidak menyajikan aset tetap tahun sebelumnya ke tahun penyajian.

Kepenghuluan pujud juga tidak menghitung nilai persediaan diakhir periode, dan diketahui bahwa pada tahun 2019 masih tersisa persediaan alat tulis kantor yang diasumsikan sebesar Rp. 350.000, dan pada tahun 2019 diketahui total pembelian alat tulis kantor sebesar Rp. 5.020.000 (lampiran 1).

Berikut perhitungan pada aset tetap yang dapat dilakukan kepenghuluan pujud :

Tabel 4.12
Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019

No	Aset Tetap	Tahun 2018	Tahun 2019	Total Aset Tetap Yang Harus Dilaporkan Tahun 2019
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Rp.68.870.000	Rp.61.500.000	Rp.130.370.000
3	Gedung dan bangunan	-	-	-
4	Jalan, jaringan dan instalasi	Rp.440.795.000	Rp.645.257.000	Rp.1.086.052.000
	Jumlah	Rp.509.665.000	Rp.706.757.000	Rp.1.216.422.000

Sumber : Data olahan penulis 2021.

Tabel 4.13
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019

No	Aset Tetap	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018		Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019	Akm. Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019
		2018	2019		
1	Peralatan dan Mesin	Rp. 13.774.000	Rp. 13.774.000	Rp. 12.300.000	Rp. 39.848.000
2	Jalan, dan jaringan instalasi	Rp. 22.039.750	Rp. 22.039.750	Rp. 32.262.850	Rp. 76.342.350
	Total	Rp. 35.813.750	Rp. 35.813.750	Rp. 44.562.850	Rp. 116.190.350

Sumber : Data olahan penulis 2021.

Pada tabel ini penulis menghitung penyusutan aset tetap pada tahun 2018 dan 2019, yang kemudian menghitung penyusutan yang akan disajikan pada laporan

kekayaan milik kepenghuluan tahun pelaporan 2019, yang mendapat total penyusutan sebesar Rp. 116.190.350.

Tabel 4.14
Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan Pujud
Sampai Dengan 31 Desember 2019

Uraian	Tahun 2019 (Tahun Periode Pelaporan) Rp.	Tahun 2018 (Tahun sebelumnya) Rp.
I. Aktiva Kepenghuluan		
A. Aktiva Lancar		
1. Kas Kepenghuluan		
a. Uang kas di Bendahara Kepenghuluan		
b. Rekening Kas Kepenghuluan	8.109.118	8.183.234
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
3. Persediaan		
a. Benda Pos dan Materai		
b. Alat Tulis Kantor	350.000	
Jumlah Aset Lancar	8.459.118	8.183.234
B. Aktiva Tidak Lancar		
1. Investasi Permanen		

a. Penyertaan Modal Pemerintah Kepenghuluan	136.000.000	
2. Aset Tetap		
a. Tanah		
b. Peralatan dan Mesin	130.370.000	68.870.000
c. Gedung dan Bangunan		
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.086.052.000	440.795.000
e. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(116.190.350)	(35.813.750)
3. Dana Cadangan		
4. Aktiva Tidak Lancar Lainnya		
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.100.231.650	473.851.250
Jumlah Aset (A+B)	1.108.690.770	482.034.484
II. Kewajiban Jangka Pendek		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
Jumlah Kekayaan Bersih (I-II)	1.108.690.770	482.034.484

Sumber : Data olahan penulis 2021

Laporan kekayaan milik kepenghuluan disajikan dengan adanya nilai penyusutan sebesar Rp. 116.190.350, kemudian memasukkan nilai persediaan yang masih tersisa sebesar Rp. 350.000, dan menyajikan nilai aset yang diperoleh pada tahun 2018 ke tahun pelaporan 2019 yang tidak dibuat oleh kepenghuluan pujud sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepenghuluan pujud menggunakan *cash basis* dalam dasar pengakuannya, yang berarti kepenghuluan pujud akan mencatat transaksi pada saat adanya penerimaan dan pengeluaran kas terjadi.
2. Sistem pencatatan yang digunakan oleh kepenghuluan pujud yaitu *single entry* atau sistem tata buku tunggal dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran.
3. Kepenghuluan pujud belum menghitung saldo persediaan yang ternyata masih tersisa, sehingga saldo persediaan pada laporan kekayaan milik kepenghuluan bersaldo Rp.0.
4. Kepenghuluan Pujud tidak melakukan penghitungan pada akumulasi penyusutan pada aset tetapnya, sehingga nilai aset tetap yang disajikan belum nilai sebenarnya .
5. Kepenghuluan pujud juga tidak menyajikan nilai aset tahun sebelumnya kedalam tahun selanjutnya pada laporan milik kepenghuluan.
6. Penerapan akuntansi pada Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir masih belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Beterima Umum (PABU).

5.2. Saran

1. Pada laporan kekayaan milik kepenghuluan sebaiknya kepenghuluan pujud menghitung dan melakukan penyesuaian pada persediaan, agar menambah keakuratan dalam penyusunan laporan kekayaan milik kepenghuluan karena nilai yang disajikan adalah nilai yang sebenarnya.
2. Sebaiknya kepenghuluan pujud juga menghitung penyusutan pada aset tetap yang terdapat pada laporan kekayaan milik kepenghuluan, agar nilai yang disajikan adalah nilai sebenarnya, dan laporan lebih akurat.
3. Pada penyajian laporan kekayaan milik kepenghuluan juga sebaiknya kepenghuluan pujud menyajikan nilai aset yang diperoleh pada tahun sebelumnya.
4. Diharapkan juga Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir mengikuti Prinsip Akuntansi Beterima Umum (PABU) dalam mengelola keuangan.
5. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadikan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan & Desa. Jakarta : Erlangga
- Djanegara, Moermahadi S. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Kesatuan press.
- Halim, Abdul dan Syam Muhammad. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nordiawan, Deddi. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penerbit Erlangga
- Purnairawan, Eddy. 2021. Pengantar Akuntansi. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rusmianto, Yuliansyah. 2017. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Samryn. 2013. Akuntansi manajemen: informasi biaya untuk mengendalikan aktivitas operasi dan informasi. Jakarta: Kencana prenadamedia group.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Warren, dkk. 2017. Pengantar akuntansi-Adaptasi Indonesia. Edisi 4. Jakarta: Salemba empat.
- Yahya, Muhtar. 2020. Logika Dasar Akuntansi. Yogyakarta : Mirra Buana Media
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP : Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. PSAK 14. Persediaan. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. PSAK 16. Aset tetap. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau